

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

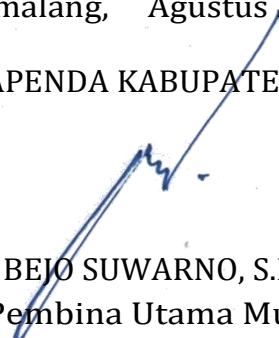
Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini disusun mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dan rancangan Rencana Strategis Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

Adapun fungsi dari dokumen ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Bapenda Kabupaten Pemalang pada tahun 2021. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026, rancangan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021, sehingga dokumen ini dapat tersusun. Kami berharap, dokumen Rencana Kerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dapat bermanfaat.

Pemalang, Agustus 2020

KEPALA BAPENDA KABUPATEN PEMALANG


BEJO SUWARNO, S.IP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611125 198607 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050/ /TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 maka perlu disusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan tahunan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenPemalang;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016- 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang; diperbarui dg perda no 13 tahun 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 4 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini;
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB.I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB.II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2019;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKATDAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABV PENUTUP

KETIGA : Keputusan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal : Agustus 2020

KEPALA BAPENDA KABUPATEN
PEMALANG



BEJO SUWARNO, S.IP
Pembina Utama Muda

NIP.19611125 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA KABUPATEN PEMALANG.....	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB.I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	11
2.1. Hasil Evaluasi Renja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2019	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	35
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	46
3.3 Program dan Kegiatan	47
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB. V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1 Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2018.....	12
2	Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapenda dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerahs/d Tahun 2019 (tahun berjalan)	14
3	Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Realisasi Anggaran Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)	24
4	Tabel 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026	33
5	Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.....	34
6	Tabel 2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.....	38
7	Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.....	45
8	Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang	52
9	Tabel 4.1 Rencana Kerjadan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.....	60

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA
NOMOR : 050 / /2020
TENTANG : RENCANA KERJA BAPENDA
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

PENDAHULUN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh daerah masing-masing sesuai otonomi daerah yang mengiringinya. Hal ini membawa konsekuensi terjadinya perubahan atas penyempurnaan mekanismedan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, menyebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi diantaranya tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan secara terus menerus untuk mewujudkan kondisi yang ideal melalui capaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai tahapan yang telah direncanakan didasarkan pada kondisi yang ideal. Dalam proses pembangunan, sumber daya yang dimiliki berusaha untuk dimanfaatkan seefektif dan semaksimal mungkin guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu perumusan alternatif atau keputusan yang didasarkan pada data-data serta fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Kualitas perencanaan memegang peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan. Sedangkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah disusun dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah dan memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai penjabaran RPJPD dan memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah

kebijakan strategi dan indikasi program 5 tahun secara lintas pembiayaan.

- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan dan merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) setiap tahun anggaran.

Sedangkan Perangkat Daerah (PD) menyusun 2 (dua) dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJPN tahun 2005 - 2025 mengamanatkan pencapaian visi "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Sementara itu visi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2005 - 2025 adalah Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari. Sedangkan visi pembangunan daerah Kabupaten Pemalang dalam RPJPD Kabupaten Pemalang 2005 - 2025 adalah Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Secara umum amanat yang dikandung dalam visi pembangunan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah maupun pembangunan nasional merupakan wujud dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai UUD 1945.

RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 - 2025 saat ini

memasuki tahap keempat periode tahun 2018 - 2023 dengan visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “, fokus pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Penyebaran covid-19 telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak bagi perekonomian Indonesia. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam menghentikan laju penyebaran covid-19 adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Terbatasnya sosial ekonomi mengurangi konsumsi dan kegiatan, investasi melambat sehingga berdampak pada laju perekonomian nasional. Maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2021 diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Berdampak juga pada kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersihdanbebasdarikorupsi,kolusidannepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 –2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13).

33. Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang;
34. Peraturan Bupati Pematang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Dalam rangka menyusun arah dan kebijakan Perangkat Daerah tahun anggaran 2021, setiap tahunnya Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Arah dan kebijakan Perangkat Daerah tersebut disusun melalui prioritas program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan unsur penunjang urusan pemerintahan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diampunya. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan APBD Tahun 2021 guna mendukung kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk:

- 1) Memberikan acuan resmi bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.
- 2) Memberikan arah dan pedoman bagi semua *stakeholders* pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam pada tahun 2021 dapat tercapai.
- 3)

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari Tahun 2021 adalah untuk :

- a. Memberikan acuan bagi para *stakeholders* di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pada tahun 2021 guna menunjang pencapaian tujuan.
- b. Memberikan tolok ukur guna pengukuran dan evaluasi kinerja selama tahun 2020 bagi para *stakeholders* Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari.
- c. Memberikan arah dan tujuan bagi para *stakeholders* Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2021 guna mencapai tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Hari Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan dari Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJADAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2019

Anggaran Belanja yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 15.795.375.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2019, terealisasi sebesar Rp. 15.237.928.057,00 (Lima belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) atau sebesar 96,47% dengan perincian:

1. **Belanja Tidak Langsung**

Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja atas Gaji dan Tunjangan PNS pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2019, Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebesar Rp.8.566.875.000,00 (Delapan miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 8.335.021.441,00 (Delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 97,29%.

2. **Belanja Langsung**

Belanja Langsung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2019, Belanja Langsung Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Besar sebesar Rp. 7.228.500.000,00 (Tujuh milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 6.902.906.616,00 (Enam milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus enam ribu enam ratus enam belas rupiah) atau sebesar 95,50%.

Secara ringkas rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran
Belanja
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pemalang
Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I	BELANJA	15.795.375.000,00	15.237.928.057,00	96,47
	Belanja Tidak Langsung	8.566.875.000,00	8.335.021.441,00	97,29
	Belanja Langsung	7.228.500.000,00	6.902.906.616,00	95,50

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh :

1. Sekretariat,
2. Bidang Perencanaan Pendapatan
3. Bidang Penagihan dan Keberata
4. Bidang Pendataan dan Penetapan (font diseragamkan)

Secara lengkap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (capaian kinerja dan realisasi anggaran) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)*

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020(20172021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.04	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan									

4.04.4.04.07.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah									
4.04.4.04.07.01.	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantora nsetiap bulan.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.01.01.	PenyediaanJasa Surat Menyurat.	Jumlah surat masuk dan suratsurat yang terkirim	28.000	14.000	7.000	7.000	100%	7.000	28.000	100%
4.04.4.04.07.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah pembayaran langa nan jasa komunikasi sum berdaya air dan listrik selama satu tahun	48	24	12	12	100%	12	48	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.04.4.04.07.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang tersusun.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Jasa kebersihan yang tersedia.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja mesin ketik, mesin hitung, alat porporasi. Dll yang	12	6	3	3	100%	3	12	100%

		tersedia								
4.04.4.04.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Alat tulis yang tersedia.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
4.04.4.04.07.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
4.04.4.04.07.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia.	167	157	5	5	100%	5	167	100%
4.04.4.04.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Surat kabar, majalah, buku peraturan perundang-undangan yang tersedia.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Makanan dan minuman yang tersedia.	16	8	4	4	100%	4	16	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.04.4.04.07.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah.	Kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar maupun dalam daerah yang tersedia.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan.	Jasa keamanan kantor yang tersedia.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.01.25	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelolaan	Peingkatan pendapatan pajak daerah dan kunjungan	48	24	12	12	100%	12	48	100%

	Pendapatan	kerjasama antar daerah yang dilaksanakan.									
4.04.4.04.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dngan baik setiap bulannya.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.04.4.04.07.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.	Tersedianya kendaraan dinas / operasional pelayanan.	13	5	0	0	100%	0	5	38%	
4.04.4.04.07.02.08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Gedung kantor	116	107	4	4	100%	3	114	98%	
4.04.4.04.07.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibutuhkan yang terpenuhi.	6	2	1	1	100%	3	6	100%	
4.04.4.04.07.02.10	Pengadaan Mebelair.	Jumlah kebutuhan mebelair yang terpenuhi.	81	70	4	4	100%	0	74	93%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.04.4.04.07.02.11	Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya.	Terpenuhinya kebutuhan komputer dan perlengkapannya yang dibutuhkan.	30	25	5	5	100%	0	30	100%
4.04.4.04.07.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor.	Gedung kantor yang terpelihara.	8	4	2	2	100%	2	8	100%
4.04.4.04.07.02.23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan.	Terpeliharanya mobil jabatan yang terpelihara rutin/ berkala.	4	2	1	1	100%	1	4	100%

4.04.4.04.07.02.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.	Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara.	195	90	45	45	100%	60	195	80%
4.04.4.04.07.02.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.02.28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair.	Pemeliharaan rutin/ berkala mebelair yang dilaksanakan setiap bulan.	24	24	0	0	0%	0	24	100%
4.04.4.04.07.02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer dan Perlengkapannya	Komputer dan perlengkapannya yang terpelihara.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.02.45	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Software dan Sistem Informasi	Kondisi software dan system informasi yang terpelihara	12	6	3	3	100%	3	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.04.4.04.07.05	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.04.4.04.07.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan	Sosialisasi/ diklat/ seminar/ workshop yang dilaksanakan.	300	150	75	75	0%	75	300	100%
4.04.4.04.07.05.04	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Tupoksi SKPD.	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi perangkat daerah yang dilaksanakan.	200	100	50	50	100%	50	200	100%

4.04.4.04.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan.	Persentase dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.04.4.04.07.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (TAPKIN).	LKjIP, perjanjian kinerja, LPPD, LKPJ yang tersusun.	35	15	15	15	100	5	5	100%
4.04.4.04.07.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran.	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang tersusun.	45	30	15	15	100%	0	45	100%
4.04.4.04.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun.	75	40	20	20	100%	15	75	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018-2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.04.4.04.07.09	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD.	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.04.4.04.07.09.01	Penyusunan Data Base Perencanaan SKPD.	Data base perencanaan yang tersedia.	6	2	2	2	100%	2	6	100%
4.04.4.04.07.09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah pelayanan informasi yang cepat dan mudah yang tersed.	25	13	6	6	100%	6	25	100%

	SKPD.									
.04.4.04.07.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya manajemen keuangan dengan ditunjang sistem dan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.04.4.04.07.15..04	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah perpub sistem dan prosedur pengelolaan pendapat daerah yang tersusun.	4	2	1	1	100%	1	4	100%
4.04.4.04.07.15.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi.	Jumlah perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah yang tersusun.	6	4	1	1	100%	1	6	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.04.4.04.07.15.13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah system informasi pemungutan pajak daerah yang tersusun.	5	3	1	1	100%	1	5	100%
4.04.4.04.07.15.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah pengawasan kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak yang diterima yang dilaksanakan.	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.15.29	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi	16	8	4	4	100%	4	16	100%

		pendapatan daerah, pengembangan sistem reward (penghargaan) bagi stakeholder PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan								
4.04.4.04.07.15.33	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pengelolaan Eks Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan	Terlaksananya sewa tanah eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	1.249	636	318	318	100%	295	1.249	100%
4.04.4.04.07.15.36	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya MOU dan tim sinergi dengan PT. PLN dan disperkim, MOU dan tim sinergi dengan kejaksaan, serasehan periodic dengan asosiasi pengusaha hotel dan restoran, notaris/PPAT, PPATS. Pemutihan pajak.	28	20	4	4	100%	4	28	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.04.4.04.07.15.37	Penyusunan Pelaporan Semesteran Aset/ Barang PD	Tersusunnya laporan semesteran asset/ barang PD	8	4	2	2	100%	2	8	100%
4.04.4.04.07.15.38	Penyusunan Perhitungan Potensi Pajak dan Target Pendapatan	Tersusunnya perhitungan potensi dan target pendapatan	8	4	2	2	100%	2	8	100%
4.04.4.04.07.15.39	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah	Tersusunnya laporan pendapatan daerah dan perhitungan UP retribusi bagi PD pengelolaan Pendapatan	48	24	12	12	100%	12	48	100%

4.04.4.04.07.15.40	Penyusunan Pemutahiran Data Pajak Daerah	Tersusunnya pemutahiran data pajak daerah	4	2	1	1	100%	1	4	100%
4.04.4.04.07.15.41	PendataanWajib Pajak	Tersedianya data wajibpajak	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.15.42	PenyusunanRekonsiliasi Data Pelaksanaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya laporan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.15.43	Penelitian/ Pemeriksaan ObyekPajak dan Wajib Pajak	Tersusunnya data penelitian/ pemeriksaan obyek pajak dan wajibpajak	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.15.44	Penilaian, Penetapan dan Pencetakan Surat ketetapan Pajak Daerah	Terbitnya surat ketetapan pajak daerah	2.711.947	1.341.298	670.649	670.649	100%	700.000	2.711.947	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = 10/4
4.04.4.04.07.15.45	Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/ SPPT/ DHKP)	Terdistribusikannya surat ketetapan pajak daerah	2.711.947	1.341.298	670.649	670.649	100%	700.000	2.711.947	100%
4.04.4.04.07.15.46	Penyusunan Daftar Tunggakan Pajak	Tersusunnya daftar tunggakan pajak daerah	48	24	12	12	100%	12	48	100%
4.04.4.04.07.15.47	Penerbitan dan Penyampaian Surat Tagihan & Surat Teguran	Terkirimnya Surat Tagihan dan Surat Teguran dan terlaksananya	48	24	12	12	100%	12	48	100%

		monitoring pajak-pajak daerah								
4.04.4.04.07.15.48	Penghapusan Piutang Pajak Daerah	Terlaksananya proses penghapusan piutang pajak daerah	4	2	0	0	0	0	2	50%
4.04.4.04.07.15.49	Penyelesaian Pengaduan dan Pelayanan Pengajuan Keberatan	Terselesaikannya pengaduan dan pengajuan keberatan	156	24	12	12	100%	120	156	100%
4.04.4.04.07.15.51	Penyelesaian Pengaduan dan Pelayanan Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak/ Pembetulan/ Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar	Terselesaikannya pengaduan dan permohonan pengurangan/ pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak daerah	36	24	12	12	100%	0	36	100%
4.04.4.04.07.15.52	Pengadaan Papan Hibauan Informasi Pajak Daerah	Terlaksananya informasi pajak daerah kepada public	992	500	250	250	100%	242	992	100%
4.04.4.04.07.15.53	Legalisasi Karcis/ Benda Berharga	Terselesaikannya porporasi karcis/ benda berharga.	48	24	12	12	100%	12	48	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Pemalang, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan. Tema Pembangunan Kabupaten Pemalang adalah “ Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas “. “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas. “. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarahmufakat dan gotongroyong;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdayalokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati;
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukumserta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang 4 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13) mempunyai tugas pokok

membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Pemalang dalam kurun waktu lima tahun ke depan maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang mendukung Misi keenam Bupati Pemalang yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah”**.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pemalang yang dijadikan rujukan serta telah dianalisis dan dikaji secara komprehensif, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merumuskan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2021- 2026 serta merumuskan pula Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang untuk merealisasikannya yaitu:

Tujuan :

1. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD .

Sasaran :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD
Meningkatnya Pertumbuhan PAD

Indikator Kinerja Utama (IKU) :

1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan
2. Pertumbuhan PAD

Adapun secara rinci gambaran Pencapaian Kinerja Bapenda Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Bapenda Kabupaten Pematang Tahun 2021 (mulai 2018-2021)

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2020 (Th. n-1)	Tahun 2021 (Th. n)	Tahun 2022 (Th. n+1)	Tahun 2019 (Th. n-2)2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan	-	-	7,25 %	7,50 %	7,80 %	7,80 %	13,30 %	-	7,80 %	7,80 %	
2.	Pertumbuhan PAD	-	-	6,15 %	6,17 %	6,20 %	6,20 %	14,73 %	-	6,20 %	6,20 %	

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan Kabupaten Pemalang dengan tema “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung sumber daya manusia yang berkualitas.”. Sejalan dengan perkembangan keadaan isu dan masalah yang ada di Kabupaten Pemalang, tahun 2021 terdapat beberapa hal yang perlu segera ditangani oleh pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu :

1. Pemulihan dampak pandemi Covid-19, yaitu:
 - a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata; serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
 - b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat; perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19.
2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

4. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Bapenda dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional maupun nasional. Terkait dengan hal tersebut, perencanaan seharusnya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi pada waktu mendatang sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan meningkat sesuai dengan tujuan bersama yaitu menuju good governance dan clean government. Terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tuntutan pelayanan prima oleh masyarakat serta adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, juga membutuhkan inovasi dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah. Aparatur daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah penghargaan kepada wajib pajak yang patuh pajak. Diharapkan dengan diberlakukannya reward and punishment, yaitu pemberian penghargaan atau hadiah bagi yang patuh pajak dan sanksi atau hukuman bagi yang melakukan pelanggaran pembayaran pajak, akan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas, isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian Bapenda Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut :

1. Beberapa regulasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan perlu dilakukan review seiring dengan perkembangan kelembagaan serta terbitnya produk hukum tingkat atasnya. Selain itu belum cukup tersedianya produk hukum yang berkaitan dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah, dan Standar Operasional Prosedur mengenai pelayanan pajak daerah yang dapat dijadikan acuan kerja sehingga memudahkan untuk melakukan upaya peningkatan

- kinerja dan mengevaluasi kinerja;
2. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 3. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, terutama dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar, termasuk dalam melakukan porporasi karcis/bill/nota penjualan serta melaporkan secara teratur bonggol karcis/bill/nota penjualan dan sisa karcis/bill/nota pejualan yang tidak laku setiap bulannya, termasuk dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 4. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham akan kemudahan dalam membayar pajak daerah;
 5. Belum semua data wajib pajak dimutakhirkan, karena masih memakai data dari KPP Pratama pelimpahan PBB-P2 tahun 2013;
 6. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat;
 7. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pendapatan daerah;
 8. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada;
 9. Terbatasnya anggaran yang tersedia;
 10. Belum optimalnya pengelolaan system informasi daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari isu-isu strategis dan permasalahan yang muncul sebagaimana tersebut di atas, maka Bapenda Kabupaten Pematang Jaya perlu memberikan perhatian dan prioritas dalam penyelesaiannya. Guna mendukung tercapainya prioritas penyelesaian isu – isu strategis dan permasalahan tersebut maka perlu disusun program dan kegiatan untuk merealisasikannya. Penyusunan program dan kegiatan Bapenda Kabupaten Pematang Jaya tahun 2021 mengacu pada program dan kegiatan tahun 2020 dan RKPD tahun 2021.

Review Rancangan awal RKPD tahun 2021 terhadap Hasil Analisa Kebutuhan tahun 2021, dapat dilihat pada table 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.6

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
BAPENDA KABUPATEN PEMALANG**

Nama Perangkat Daerah :Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.445.215	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.445.215	
	<u>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</u>				3.445.215	<u>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</u>				3.445.215	
1	Program PelayananAdministrasiPerkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan		12.00 bulan	821.970	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan		12.00 bulan	821.970	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen	Bapenda	1 paket	15.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen	Bapenda	1 paket	15.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Bapenda	12.00 bulan	125.418	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Bapenda	12.00 bulan	125.418	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	Bapenda	60.00 unit	18.974	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	Bapenda	60.00 unit	18.974	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang tersusun	Bapenda	12.00 bulan	13.510	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang tersusun	Bapenda	12.00 bulan	13.510	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	Bapenda	12.00 bulan	25.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	Bapenda	12.00 bulan	25.000	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservis	Bapenda	3.00 Jenis	7.500	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservis	Bapenda	3.00 Jenis	7.500	
7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	Bapenda	1.00 paket	40.000	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	Bapenda	1.00 paket	40.000	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Bapenda	1.00 paket	20.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Bapenda	1.00 paket	20.000	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Bapenda	1.00 paket	25.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Bapenda	1.00 paket	25.000	
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Bapenda	3.00 Jenis	29.500	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Bapenda	3.00 Jenis	29.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, majalah, bukuperaturanperundang-undangan yang tersedia	Bapenda	2.00 Jenis	14.100	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, majalah, bukuperaturanperundang-undangan yang tersedia	Bapenda	2.00 Jenis	14.100	
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Bapenda	9.00 bulan	80.000	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Bapenda	9.00 bulan	80.000	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Bapenda	4.00 kegiatan	164.536	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Jumlah rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Bapenda	4.00 kegiatan	164.536	
14	Penyediaan Jasa Keamanan	Jasakeamanankantor yang tersedia	Bapenda	12.00 kali	12.000	Penyediaan Jasa Keamanan	Jasakeamanankantor yang tersedia	Bapenda	12.00 kali	12.000	
15	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	Peningkatan pendapatan pajak daerah dan kunjungan kerjasama antardaerah yang dilaksanakan	Bapenda	12.00 bulan	211.350	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	Peningkatan pendapatan pajak daerah dan kunjungan kerjasama antardaerah yang dilaksanakan	Bapenda	12.00 bulan	211.350	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan		12.00 bulan	462.236	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan		12.00 bulan	462.236	
16	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Bapenda	4.00 unit	0	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Bapenda	4.00 unit	0	
17	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Bapenda	0.00 unit	0	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Bapenda	0.00 unit	0	
18	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	Bapenda	2.00 unit	25.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	Bapenda	2.00 unit	25.000	
19	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	Bapenda	2.00 unit	0	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	Bapenda	2.00 unit	0	
20	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah dan jenis komputer dan perlengkapannya yang dibeli	Bapenda	2.00 unit	6.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah dan jenis komputer dan perlengkapannya yang dibeli	Bapenda	2.00 unit	6.000	
21	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan luas gedung kantor yang diperlihara	Bapenda	1.00 unit	68.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan luas gedung kantor yang diperlihara	Bapenda	1.00 unit	68.000	
22	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Bapenda	1.00 unit	25.000	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Bapenda	1.00 unit	25.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Bapenda	58.00 unit	75.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Bapenda	58.00 unit	75.000	
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Bapenda	4.00 unit	15.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Bapenda	4.00 unit	15.000	
25	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Bapenda	1.00 unit	0	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Bapenda	1.00 unit	0	
26	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jenis dan jumlah mebeleur yang dipelihara	Bapenda	0.00 unit	0	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jenis dan jumlah mebeleur yang dipelihara	Bapenda	0.00 unit	0	
27	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jenis dan jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	Bapenda	25.00 kali	85.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jenis dan jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	Bapenda	25.00 kali	85.000	
28	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jenis dan jumlah software yang dipelihara	Bapenda	1.00 paket	216.038	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jenis dan jumlah software yang dipelihara	Bapenda	1.00 paket	216.038	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN		3.63 %	0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN		3.63 %	0	
29	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/diklat/seminar/workshop	Bapenda	75.00 orang	0	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/diklat/seminar/workshop	Bapenda	75.00 orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
30	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Bapenda	50.00 orang	0	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Bapenda	50.00 orang	0	
	Program peningkatan, pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan		12.00 bulan	25.060	Program peningkatan, pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan		12.00 bulan	25.060	
31	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah LKjIP, Perjanjian kinerja, LPPD, LKPJ yang tersusun	Bapenda	4.00 kegiatan	13.920	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah LKjIP, Perjanjian kinerja, LPPD, LKPJ yang tersusun	Bapenda	4.00 kegiatan	13.920	
32	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang tersusun	Bapenda	0.00 buku	0	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang tersusun	Bapenda	0.00 buku	0	
33	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Bapenda	15.00 buku	11.140	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Bapenda	15.00 buku	11.140	
	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		12.00 bulan	59.340	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		12.00 bulan	59.340	
34	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Jumlah Data base perencanaan yang tersedia	Bapenda	2.00 kegiatan	5.600	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Jumlah Data base perencanaan yang tersedia	Bapenda	2.00 kegiatan	5.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
35	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah pelayanan informasi yang cepat dan mudah yang tersedia	Bapenda	6.00dokumen	53.740	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah pelayanan informasi yang cepat dan mudah yang tersedia	Bapenda	6.00dokumen	53.740	
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rasio realisasi PAD terhadap total pendapatan		7.50 %	2.076.609	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rasio realisasi PAD terhadap total pendapatan		7.50 %	2.076.609	
36	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah perpub sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	Bapenda	1.00 dokumen	12.266	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah perpub sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	Bapenda	1.00 dokumen	12.266	
37	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah yang tersusun	Bapenda	1.00 dokumen	43.650	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah yang tersusun	Bapenda	1.00 dokumen	43.650	
38	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah system informasi pemungutan pajak daerah yang tersusun	Bapenda	2.00 aplikasi	65.352	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah system informasi pemungutan pajak daerah yang tersusun	Bapenda	2.00 aplikasi	65.352	
39	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah pengawasan kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak yang diterima yang dilaksanakan	Bapenda	12.00 kegiatan	65.245	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah pengawasan kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak yang diterima yang dilaksanakan	Bapenda	12.00 kegiatan	65.245	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
40	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi pendapatan daerah, pengembangan sistem reward (penghargaan) bagi stakeholder PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan yang dilaksanakan	Bapenda	4.00 kegiatan	416.800	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi pendapatan daerah, pengembangan sistem reward (penghargaan) bagi stakeholder PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan yang dilaksanakan	Bapenda	4.00 kegiatan	416.800	
41	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	Jumlah sewa tanah eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan yang dilelang	Bapenda	318.00 Ha	38.300	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	Jumlah sewa tanah eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan yang dilelang	Bapenda	318.00 Ha	38.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
42	Peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah	Jumlah MOU dan tim sinergi dengan PT. PLN dan disperkim, MOU dan tim sinergi dengan kejaksaan, serasehan periodik dengan asosiasi pengusaha hotel dan restoran, notaris/PPAT, PPATS, pemutihan pajak yang dilaksanakan	Bapenda	2.00 kegiatan	312.343	Peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah	Jumlah MOU dan tim sinergi dengan PT. PLN dan disperkim, MOU dan tim sinergi dengan kejaksaan, serasehan periodik dengan asosiasi pengusaha hotel dan restoran, notaris/PPAT, PPATS, pemutihan pajak yang dilaksanakan	Bapenda	2.00 kegiatan	312.343	
43	Penyusunan pelaporan semesteran aset/ barang PD	jumlah laporan semesteran aset/barang PD yang disusun	Bapenda	10.00 buku	2.933	Penyusunan pelaporan semesteran aset/ barang PD	jumlah laporan semesteran aset/barang PD yang disusun	Bapenda	10.00 buku	2.933	
44	Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan	Jumlah perhitungan potensi dan target pendapatan yang disusun	Bapenda	2.00 dokumen	139.450	Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan	Jumlah perhitungan potensi dan target pendapatan yang disusun	Bapenda	2.00 dokumen	139.450	
45	Penyusunan laporan pendapatan daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah dan perhitungan UP retribusi bagi PD pengelola pendapatan yang disusun	Bapenda	4.00 kali	11.562	Penyusunan laporan pendapatan daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah dan perhitungan UP retribusi bagi PD pengelola pendapatan yang disusun	Bapenda	4.00 kali	11.562	
46	Penyusunan Pemutakhiran data pajak daerah	Jumlah pemutakhiran data pajak daerah yang disusun	Bapenda	1.00 kegiatan	10.765	Penyusunan Pemutakhiran data pajak daerah	Jumlah pemutakhiran data pajak daerah yang disusun	Bapenda	1.00 kegiatan	10.765	
47	Pendataan Wajib Pajak	Jumlah data wajib pajak yang tersedia	Bapenda	12.00 kali	92.400	Pendataan Wajib Pajak	Jumlah data wajib pajak yang tersedia	Bapenda	12.00 kali	92.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
48	Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah yang disusun	Bapenda	12.00 kali	7.739	Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah yang disusun	Bapenda	12.00 kali	7.739	
49	Penelitian/ pemeriksaan Obyek Pajak dan Wajib Pajak	Jumlah data penelitian/pemeriksaan obyek pajak dan wajib pajak yang disusun	Bapenda	12.00 kali	35.000	Penelitian/ pemeriksaan Obyek Pajak dan Wajib Pajak	Jumlah data penelitian/pemeriksaan obyek pajak dan wajib pajak yang disusun	Bapenda	12.00 kali	35.000	
50	Penilaian, penetapan dan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	Bapenda	671700.00 dokumen	319.550	Penilaian, penetapan dan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	Bapenda	671700.00 dokumen	319.550	
51	Penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/ SPPT/ DHKP)	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang didistribusikan	Bapenda	671700.00 dokumen	52.450	Penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/ SPPT/ DHKP)	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang didistribusikan	Bapenda	671700.00 dokumen	52.450	
52	Penyusunan daftar tunggakan pajak	Jumlah daftar tunggakan pajak daerah yang disusun	Bapenda	12.00 kali	8.920	Penyusunan daftar tunggakan pajak	Jumlah daftar tunggakan pajak daerah yang disusun	Bapenda	12.00 kali	8.920	
53	Penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan dan Surat Teguran	Jumlah surat tagihan dan surat teguran yang dikirim dan jumlah monitoring pajak-pajakdaerah yang dilaksanakan	Bapenda	12.00 kali	233.390	Penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan dan Surat Teguran	Jumlah surat tagihan dan surat teguran yang dikirim dan jumlah monitoring pajak-pajakdaerah yang dilaksanakan	Bapenda	12.00 kali	233.390	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianK inerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Target CapaianKine rja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	3	4	5	6		3	4	5	6		
54	Penghapusan piutang Pajak Daerah	Jumlah proses penghapusan piutang pajak daerah yang dilaksanakan	Bapenda	0.00 dokumen	0	Penghapusan piutang Pajak Daerah	Jumlah proses penghapusan piutang pajak daerah yang dilaksanakan	Bapenda	0.00 dokumen	0	
55	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan	Jumlah pengaduan dan pengajuan keberatan yang diselesaikan	Bapenda	12.00 kali	32.670	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan	Jumlah pengaduan dan pengajuan keberatan yang diselesaikan	Bapenda	12.00 kali	32.670	
56	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/ pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar	Jumlah pengaduan dan permohonan pengurangan/pembetulan/pembatalan ketetapan pajak daerah yang diselesaikan	Bapenda	12.00 kali	35.305	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/ pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar	Jumlah pengaduan dan permohonan pengurangan/pembetulan/pembatalan ketetapan pajak daerah yang diselesaikan	Bapenda	12.00 kali	35.305	
57	Pengadaan Papan Hibauan Informasi Pajak Daerah	Jumlah media informasi pajak daerah kepada publik yang disediakan	Bapenda	3 paket	105.000	Pengadaan Papan Hibauan Informasi Pajak Daerah	Jumlah media informasi pajak daerah kepada publik yang disediakan	Bapenda	3 paket	105.000	
58	Legalisasi karcis/ benda berharga	Jumlah dan jenis porporasi karcis/benda berharga yang diselesaikan	Bapenda	12.00 kali	6.800	Legalisasi karcis/ benda berharga	Jumlah dan jenis porporasi karcis/benda berharga yang diselesaikan	Bapenda	12.00 kali	6.800	

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang No. 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah **“membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah”**.

Sesuai dengan tugas pokok tersebut maka OPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tidak mempunyai program dan kegiatan yang berkaitan atau menampung usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Tabel 2.7

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021 BAPENDA KABUPATEN PEMALANG

Nama Perangkat Daerah : BAPENDA Kabupaten Pemalang

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Penghapusan PBB	Pemalang	Jumlah PBB yang dihapus	105.000 petani tidak mampu	Pokir DPRD Kab. Pemalang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 – 2026, dimana didalamnya termuat Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2019 - 2024 dan memuat juga Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005–2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Visi Pembangunan Nasional yang dimuat dalam RPJMN tahun 2019 - 2024 adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Visi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju,berkeseimbangan dan demokratis berdasarkan negarahukum.
3. Mewujudkan politikluar negeri bebas – aktif dan memperkuat jati diri sebagai negaramaritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdayasaing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda

prioritas yang disebut dengan NAWA CITA, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestic;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa;
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.3 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang sudah sinergi dengan arah pembangunan nasional yaitu :

- Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari
- Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Visi tersebut dijabarkan dalam 4 misi pembangunan Jawa Tengah yaitu :

1. Membangun masyarakat Jateng yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI.
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jateng lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Arah Kebijakan Tahun 2021 Pembangunan tahun 2021 ditujukan pada

“Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat didukung penguatan daya saing SDM”, dengan arah kebijakan meliputi:

1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayahserta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

3.4 Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

Dalam pasal 262 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Berkaitan dengan hal tersebut maka rumusan visi dan misi Kepala Daerah terpilih akan menjadi “anchor” yang harus dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Demikian halnya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pengertian visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan yang disebut misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa mengingat visi, misi, dan program kepala daerah merupakan hasil proses politik terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, V-2 dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD, namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, manageable, dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan

daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah. Rumusan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: “TERWUJUDNYA PEMATANG Siantar HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATIDIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2016-2021 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Pematang Siantar Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut: Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah. V-5
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

3.5 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Kabupaten Pemalang. Dalam menentukan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang tidak terlepas dari Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang. Secara rinci Tujuan dan Sasaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang adalah sbb:

3.5.1 Tujuan

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 telah ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang yaitu :

“Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD”

3.5.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang antara lain :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Unsur Pajak Daerah;

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta efisien dalam pemanfaatan APBD	Rasio realisasi PAD terhadap potensi/target PAD	7,80
2.	Peningkatan/pertumbuhan PAD		Peningkatan / pertumbuhan	6,20

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang terdiri dari 6 program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel : 4.1

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Rencana 2021
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang**

KODE		Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Png	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.445.215.000				3.445.215.000	
4	4	<u>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</u>				3.445.215.000				3.445.215.000	
4	4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan		12.00 bulan	821.969.960		12.00 bulan	821.969.960	
4	4	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk, surat keluar, materai dan pengiriman dokumen	Bapenda	7000.00 surat	15.000.000	APBD	7000.00 surat	15.000.000
4	4	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Bapenda	12.00 bulan	125.418.000	APBD	12.00 bulan	125.418.000
4	4	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	Bapenda	60.00 unit	18.974.000	APBD	60.00 unit	18.974.000
4	4	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan bulanan administrasi keuangan yang tersusun	Bapenda	12.00 bulan	13.510.000	APBD	12.00 bulan	13.510.000

KODE				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Ptnng	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
4	4	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	Bapenda	12.00 bulan	25.000.000	APBD		12.00 bulan	25.000.000
4	4	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservis	Bapenda	3.00 Jenis	7.500.000	APBD		3.00 Jenis	7.500.000
4	4	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia	Bapenda	1.00 paket	40.000.000	APBD		1.00 paket	40.000.000
4	4	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang yang dicetak dan digandakan	Bapenda	1.00 paket	20.000.000	APBD		1.00 paket	20.000.000
4	4	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	Bapenda	1.00 paket	25.000.000	APBD		1.00 paket	25.000.000
4	4	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Bapenda	3.00 Jenis	29.500.000	APBD		3.00 Jenis	29.500.000
4	4	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar, majalah, buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	Bapenda	2.00 Jenis	14.100.000	APBD		2.00 Jenis	14.100.000
4	4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Bapenda	9.00 bulan	80.000.000	APBD		9.00 bulan	80.000.000
4	4	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Bapenda	4.00 kegiatan	164.535.960	APBD		4.00 kegiatan	164.535.960
4	4	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jasa keamanan kantor yang tersedia	Bapenda	12.00 kali	12.000.000	APBD		12.00 kali	12.000.000
4	4	1	25	Penyediaan jasa administrasi keuangan pengelolaan pendapatan	Peningkatan pendapatan pajak daerah dan kunjungan kerjasama antara daerah yang dilaksanakan	Bapenda	12.00 bulan	211.350.000	APBD		12.00 bulan	211.350.000

KODE				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Ptnng	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan		12.00 bulan	462.235.500			12.00 bulan	462.235.500
4	4	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dibeli	Bapenda	4.00 unit	0	APBD		5.00 unit	0
4	4	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Bapenda	0.00 unit	0	APBD		0.00 unit	0
4	4	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	Bapenda	2.00 unit	25.000.000	APBD		2.00 unit	25.000.000
4	4	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	Bapenda	2.00 unit	0	APBD		2.00 unit	0
4	4	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah dan jenis komputer dan perlengkapannya yang dibeli	Bapenda	2.00 unit	6.000.000	APBD		2.00 unit	6.000.000
4	4	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	Bapenda	1.00 unit	67.999.500	APBD		1.00 unit	67.999.500
4	4	2	23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Bapenda	1.00 unit	25.000.000	APBD		1.00 unit	25.000.000
4	4	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Bapenda	58.00 unit	75.000.000	APBD		58.00 unit	75.000.000
4	4	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Bapenda	4.00 unit	15.000.000	APBD		4.00 unit	15.000.000
4	4	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	Jenis dan jumlah peralatan gedung kantor yang	Bapenda	1.00 unit	0	APBD		1.00 unit	0

KODE				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Ptnng	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
				gedung kantor	dipelihara							
4	4	2	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jenis dan jumlah mebeleur yang dipelihara	Bapenda	0.00 unit	0	APBD	0.00 unit	0	
4	4	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jenis dan jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	Bapenda	25.00 kali	85.000.000	APBD	25.00 kali	85.000.000	
4	4	2	45	Pemeliharaan rutin/berkala software dan sistem informasi	Jenis dan jumlah software yang dipelihara	Bapenda	1.00 paket	216.038.000	APBD	1.00 paket	216.038.000	
4	4	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN		3.63 %	0		3.63 %	0	
4	4	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/diklat/seminar/workshop	Bapenda	75.00 orang	0	APBD	75.00 orang	0	
4	4	5	4	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Bapenda	50.00 orang	0	APBD	50.00 orang	0	
4	4	6		Program peningkatan, pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersedianya dokumen capaian kinerja dan keuangan		12.00 bulan	25.060.000		12.00 bulan	25.060.000	
4	4	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah LKjIP, Perjanjian kinerja, LPPD, LKPJ yang tersusun	Bapenda	4.00 kegiatan	13.920.000	APBD	4.00 kegiatan	13.920.000	
4	4	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran perangkat daerah yang tersusun	Bapenda	0.00 buku	0	APBD	0.00 buku	0	

KODE				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (TahunRencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Target CapaianKinerja	Kebutuhan Dana/PaguIn dikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Ptng	Target CapaianKinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	4	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Bapenda	15.00 buku	11.140.000	APBD		15.00 buku	11.140.000
4	4	9		Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		12.00 bulan	59.340.000			12.00 bulan	59.340.000
4	4	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Jumlah Data base perencanaan yang tersedia	Bapenda	2.00 kegiatan	5.600.000	APBD		2.00 kegiatan	5.600.000
4	4	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah pelayanan informasi yang cepat dan mudah yang tersedia	Bapenda	6.00dokumen	53.740.000	APBD		6.00dokumen	53.740.000
4	4	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rasio realisasi PAD terhadap total pendapatan		7.50 %	2.076.609.000			7.50 %	2.076.609.000
4	4	15	4	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah perpub sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang tersusun	Bapenda	1.00 dokumen	12.266.000	APBD		1.00 dokumen	12.266.000
4	4	15	5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah yang tersusun	Bapenda	1.00 dokumen	43.650.000	APBD		1.00 dokumen	43.650.000
4	4	15	13	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	Jumlah system informasi pemungutan pajak daerah yang tersusun	Bapenda	2.00 aplikasi	65.352.000	APBD		2.00 aplikasi	65.352.000
4	4	15	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah pengawasan kepatuhan wajib pajak, tunggakan pajak yang diterima yang dilaksanakan	Bapenda	12.00 kegiatan	65.245.000	APBD		12.00 kegiatan	65.245.000

KODE				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Ptnng	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
4	4	15	29	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi pendapatan daerah, pengembangan sistem reward (penghargaan) bagi stakeholder PAD dan peningkatan kualitas pengelolaan yang dilaksanakan	Bapenda	4.00 kegiatan	416.800.000	APBD		4.00 kegiatan	416.800.000
4	4	15	33	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah pengelolaan eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan	Jumlah sewa tanah eks bondo desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan yang dilelang	Bapenda	318.00 Ha	38.300.000	APBD		318.00 Ha	38.300.000
4	4	15	36	Peningkatan efektifitas pengelola keuangan daerah	Jumlah MOU dan tim sinergi dengan PT. PLN dan disperkim, MOU dan tim sinergi dengan kejaksaan, serasehan periodik dengan asosiasi pengusaha hotel dan restoran, notaris/PPAT, PPATS, pemutihan pajak yang dilaksanakan	Bapenda	2.00 kegiatan	312.343.000	APBD		2.00 kegiatan	312.343.000
4	4	15	37	Penyusunan pelaporan semesteran aset/ barang PD	jumlah laporan semesteran aset/barang PD yang disusun	Bapenda	10.00 buku	2.932.500	APBD		10.00 buku	2.932.500
4	4	15	38	Penyusunan perhitungan potensi pajak dan target pendapatan	Jumlah perhitungan potensi dan target pendapatan yang disusun	Bapenda	2.00 dokumen	139.450.000	APBD		2.00 dokumen	139.450.000

KODE				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (TahunRencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Ptnng	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	4	15	39	Penyusunan laporan pendapatan daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah dan perhitungan UP retribusi bagi PD pengelola pendapatan yang disusun	Bapenda	4.00 kali	11.561.500	APBD		4.00 kali	11.561.500
4	4	15	40	Penyusunan Pemutakhiran data pajak daerah	Jumlah pemutakhiran data pajak daerah yang disusun	Bapenda	1.00 kegiatan	10.765.040	APBD		1 kegiatan	10.765.040
4	4	15	41	Pendataan Wajib Pajak	Jumlah data wajib pajak yang tersedia	Bapenda	12.00 kali	92.400.000	APBD		12.00 kali	92.400.000
4	4	15	42	Penyusunan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi data pelaksanaan pendapatan daerah yang disusun	Bapenda	12.00 kali	7.739.000	APBD		12.00 kali	7.739.000
4	4	15	43	Penelitian/ pemeriksaan Obyek Pajak dan Wajib Pajak	Jumlah data penelitian/pemeriksaan obyek pajak dan wajib pajak yang disusun	Bapenda	12.00 kali	35.000.000	APBD		12.00 kali	35.000.000
4	4	15	44	Penilaian, penetapan dan pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	Bapenda	671700.00 dokumen	319.550.000	APBD		671700.00 dokumen	319.550.000
4	4	15	45	Penerbitan dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD/ SPPT/ DHKP)	Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang didistribusikan	Bapenda	671700.00 dokumen	52.450.000	APBD		671700.00 dokumen	52.450.000
4	4	15	46	Penyusunan daftar tunggakan pajak	Jumlah daftar tunggakan pajak daerah yang disusun	Bapenda	12.00 kali	8.920.000	APBD		12.00 kali	8.920.000
4	4	15	47	Penerbitan dan penyampaian Surat Tagihan dan Surat Teguran	Jumlah surat tagihan dan surat teguran yang dikirim dan jumlah monitoring pajak-pajakdaerah yang dilaksanakan	Bapenda	12.00 kali	233.390.000	APBD		12.00 kali	233.390.000
4	4	15	48	Penghapusan piutang Pajak Daerah	Jumlah proses penghapusan piutang pajak daerah yang	Bapenda	0.00 dokumen	0	APBD		0.00 dokumen	0

KODE				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Ptnng	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
					dilaksanakan							
4	4	15	49	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan pengajuan keberatan	Jumlah pengaduan dan pengajuan keberatan yang diselesaikan	Bapenda	12.00 kali	32.670.000	APBD		12.00 kali	32.670.000
4	4	15	51	Penyelesaian pengaduan dan pelayanan permohonan pengurangan ketetapan pajak/ pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar	Jumlah pengaduan dan permohonan pengurangan/pembetulan/pembatalan ketetapan pajak daerah yang diselesaikan	Bapenda	12.00 kali	35.305.000	APBD		12.00 kali	35.305.000
4	4	15	52	Pengadaan Papan Himbauan Informasi Pajak Daerah	Jumlah media informasi pajak daerah kepada publik yang disediakan	Bapenda	3 paket	105.000.000	APBD		3 paket	105.000.000
4	4	15	53	Legalisasi karcis/ benda berharga	Jumlah dan jenis porporasi karcis/benda berharga yang diselesaikan	Bapenda	12.00 kali	6.800.000	APBD		12.00 kali	6.800.000

BAB V

PENUTUP

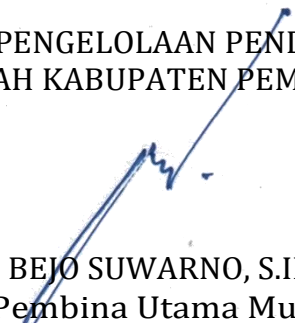
Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021.

Pada Renja memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut masih bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran serta kemampuan keuangan daerah yang tersedia.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 ini masih belum sempurna. Sehingga kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan guna perbaikan dokumen tersebut. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu satu tahun kedepan.

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG



BEJO SUWARNO, S.IP.
Pembina Utama Muda
NIP.196111251986071001